

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMISKINAN TERHADAP IPM KABUPATEN SIMALUNGUN

Oleh :

Sanniana Sidabutar¹, Elidawaty Purba², Pawer Darasa Panjaitan³

Sanniana49@gmail.com, elidawatypurba@usi.ac.id, pawerpanjaitan@gmail.com

Universitas Simalungun

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM merupakan indeks yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 2019 untuk mengukur kesejahteraan rakyat. IPM Kabupaten Simalungun terus meningkat selama periode 2010-2019, akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Simalungun dengan angka persentase paling rendah diantara 32 kecamatan lainnya yaitu < 60 persen. Penelitian ini meneliti tentang pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Simalungun.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini tersedia dan bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Simalungun. Data diambil dari BAPPEDA kabupaten simalungun tahun 2010-2019 dengan variabel dependen IPM dan variabel independen pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD untuk pendidikan, APBD untuk kemiskinan, dan Rasio Ketergantungan Penduduk. Model ini di estimasi menggunakan program spss 21 dengan melalui berbagai uji yaitu uji t dan uji F.

Hasil analisis dari penelitian ini variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM adalah APBD untuk pendidikan dan kemiskinan, variabel rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan IPM melalui pendidikan dan kemiskinan, penyediaan pelayanan pendidikan dan kemiskinan, dengan memaksimalkan APBD 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kemiskinan sesuai dengan amanat UUD yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan IPM di Kabupaten Simalungun.

Kata kunci : *Indeks Pembangunan Manusia, BAPPEDA untuk pendidikan dan kemiskinan, Badan Pusat Statistik untuk rasio ketergantungan.*

Abstract

The Human Development Index (HDI) is a comparative measure of life expectancy, literacy, education and living standards for all countries around the world. The HDI is an index set by the UNDP (United Nations Development Program) in 2019 to measure people's welfare. The HDI of Simalungun Regency continued to increase during the 2010-2019 period, however the Human Development Index (HDI) in Simalungun Regency with the lowest percentage rate among the other 32 sub-districts is < 60 percent. This study examines government spending in the education sector and poverty on HDI in Simalungun Regency.

The data used for this research is secondary data. This secondary data is available and sourced from BPS (Central Bureau of Statistics) and BAPPEDA (Regional Development Planning Agency) Simalungun Regency. The data is taken from BAPPEDA Simalungun Regency in 2010-2019 with the HDI dependent variable and the independent variable on government spending in the form of APBD for education, APBD for poverty, and Population Dependency Ratio. This model is estimated using the SPSS 21 program through various tests, namely the t test and the F test.

The results of the analysis of this study, the variables that have a positive and significant effect on HDI are APBD for education and poverty, the dependency ratio variable has a positive and significant effect on HDI. Therefore the government must increase the HDI through education and poverty, provision of education services and poverty, by maximizing the APBD 20 percent for education and 10 percent for poverty in accordance with the mandate of the applicable Constitution, so as to increase HDI in Simalungun Regency.

Key : *Human Development Index, BAPPEDA for education and poverty, Central Bureau of Statistics for dependency ratio*

LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah didefinisikan dalam dua dimensi ,yaitu tujuan dan proses. Tujuan pembangunan sudah past iuntuk menciptakan kondisi kehidupan kearah yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan Proses untuk mencapa itu tujuan itu diwujudkan dalam strategi pembangunan. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah di Kabupaten Simalungun banyak mengalami hambatan, apalagi bila system pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf dan rata - rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata - rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Untuk mengetahui perkembangan IPM Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1. Pada tahun 2019 sampai 2010 IPM Sumatera Utara. IPM Sumatera Utara antara tahun 2019 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar 23 persen yakni dari 19 menjadi 23 , angka tersebut menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 1,2 persen setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Pada Tahun 2019 - 2010

Kabupaten/Kota	IPM										
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
Nias	61.65	60.82	60.21	59.75	58.85	57.98	57.43	56.50	55.55	54.72	
Mandailing Natal	66.52	65.83	65.13	64.55	63.95	63.42	62.91	62.26	61.60	60.76	
Tapanduli Selatan	69.75	69.10	68.69	68.04	67.63	67.22	66.75	65.95	65.14	64.20	
Tapanduli Tengah	68.86	68.27	67.96	67.27	67.06	66.16	65.64	65.43	65.16	64.39	
Tapanduli Utara	73.33	72.91	72.38	71.96	71.32	70.70	70.50	69.83	69.24	68.43	
Toba Samosir	74.92	74.48	73.87	73.61	73.40	72.79	72.36	71.89	71.39	70.90	
Labuhanbatu	71.94	71.39	71	70.50	70.23	70.06	69.45	68.64	67.88	66.88	
Asahan	69.92	69.49	69.10	68.71	68.40	67.51	66.58	66.23	65.87	65.06	
Simalungun	72.98	72.49	71.83	71.48	71.24	70.89	70.28	69.79	69.03	68.80	
Dairi	71.42	70.89	70.36	69.61	69	67.91	67.15	66.95	66.62	65.91	
Karo	74.25	73.91	73.53	73.29	72.66	71.84	71.62	71.40	71.12	70.36	
Deli Serdang	75.43	74.92	73.94	73.51	72.75	71.98	71.39	70.88	70.25	70.06	
Langkat	70.76	70.27	69.82	69.13	68.53	68	67.17	66.18	65.77	64.57	
Nias Selatan	61.59	60.75	59.85	59.14	58.74	57.78	56.78	55.97	55.50	54.54	
Humbang Hasundutan	68.83	67.96	67.30	66.56	66.03	65.59	64.92	64.54	64.06	63.40	
Pakpak Bharat	67.47	66.63	66.25	65.81	65.53	65.06	64.73	63.88	63.11	61.76	
Samosir	70.55	69.99	69.43	68.82	68.43	67.80	66.80	66.31	65.81	65.14	
Serdang Bedagai	70.21	69.69	69.16	68.77	68.01	67.78	67.11	66.14	65.28	64.67	
Batu Bara	68.35	67.67	67.20	66.69	66.02	65.50	65.06	64.45	63.95	63.45	
Padang Lawas Utara	69.29	68.77	68.34	68.05	67.35	66.50	66.13	65.65	65.22	64.25	
Padang Lawas	68.16	67.59	66.82	66.23	65.95	65.50	64.62	64.05	63.28	62.45	
Labuhanbatu Selatan	71.39	70.98	70.48	70.28	69.67	68.59	67.78	67.06	65.77	65.32	
Labuhanbatu Utara	71.43	71.08	70.79	70.26	69.65	69.15	68.28	67.84	67.37	66.72	
Nias Utara	61.98	61.08	60.57	60.23	59.88	59.18	58.29	57.87	57.53	-	
Nias Barat	61.14	60.42	59.56	59.03	58.25	57.54	56.58	56.20	55.43	-	
Sibolga	73.41	72.65	72.28	72	71.64	71.01	70.45	69.71	69.17	68.37	
Tanjungbalai	68.51	68	67.41	67.09	66.74	66.05	65.40	64.89	64.13	63.47	
Pematangsiantar	78.57	77.88	77.54	76.90	76.34	75.83	75.05	74.51	73.61	72.52	
Tebing Tinggi	75.08	74.50	73.90	73.58	72.81	72.13	71.85	71.34	70.84	69.96	
Medan	80.97	80.65	79.98	79.34	78.87	78.26	78	77.78	77.54	77.02	
Binjai	75.89	75.21	74.65	74.11	73.81	72.55	72.02	71.54	70.85	70.54	
Padangsidempuan	75.06	74.38	73.81	73.42	72.80	71.88	71.68	71.38	71.08	70.23	
Gunungsitoli	69.30	68.33	67.68	66.68	66.41	65.91	65.25	64.34	63.71	-	

Indeks pembangunan manusia kemudian menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan indicator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat / penduduk) serta IPM dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah / negara (BPS, 2019). Pembangunan manusia di Simalungun terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun mencapai 72,98. Angka ini meningkat sebesar 0,66 poin atau tumbuh sebesar 0,92 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 1.2
IPM SIMALUNGUN TAHUN 2019 - 2010

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat Simalungun meningkat dari 68,80 pada tahun 2010 menjadi 72,98 pada tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia Selama periode tersebut, IPM Simalungun rata-rata tumbuh sebesar 0,66 persen per tahun. Pada periode 2018-2019, IPM Simalungun tumbuh 0,68 persen. Selama periode 2010 hingga 2019, IPM Simalungun menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Simalungun mengalami peningkatan. Saat ini, pembangunan manusia Simalungun telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2013. Sementara selama periode 2010 hingga 2012 pembangunan manusia Simalungun hanya berstatus “sedang”.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945 yang diterjemahkan kedalam berbagai agenda pembangunan negara. Saat ini penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Semua kabupaten/kota maupun Provinsi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Simalungun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) tetapi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih rendah. Hal ini membuat Sumber Daya Alam (SDM) belum mampu memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada secara optimal. Oleh karena itu, Kabupaten Simalungun tetap terkungkung dalam masalah kemiskinan ditengah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun, maka menurunnya tingkat kemiskinan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun salah satu yang menempatkan pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan

IPM TAHUN 2010 - 2019 SIMALUNGUN	
TAHUN	IPM
2010	68.8
2011	69.03
2012	69.79
2013	70.28
2014	70.89
2015	71.24
2016	71.48
2017	71.83
2018	72.49
2019	72.98

berbagai usaha - usaha yang dilakukan pemerintah Pemerintah Kabupaten Simalungun sejak orde lama hingga era reformasi. Undang - Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang terkait dengan pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD”.

Pada tahun 2019 anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk bidang pendidikan adalah 12.17 milyar rupiah dan anggaran yang terserap sebesar 8,04 persen. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu Negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau

rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh peeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kemiskinan terhadap IPM kabupaten simalungun. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan terhadap IPM Kabupaten Simalungun.”

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah

Pemerintah adalah Mengatur dan menjalankan tugas suatu system pemerintahan yaitu, eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemerintah mempunyai peran sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin negara, meneggakan hukum dan memberantas kekacauan untuk mensejahterakan rakyat. Bagian ini menjabarkan teori - teori yang mendukung perumusan hipotesis diantaranya adalah teori pengeluaran pemerintah, pendidikan, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia,

Pendidikan

Pendidikan posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. (Umar Tirtarahardja ,2017: 300).

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistic pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas social mereka.

Secara alternative pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kompetensi yang dimiliki. Sayangnya, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengenyam dunia pendidikan karena faktor mahalny biaya pendidikan. Dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, pemerintah telah mencanangkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD dan SMP . Pemberian BOS ini dimaksudkan agar masyarakat miskin mampu memperoleh pendidikan minimal samapi SMP (Bambang Suprayitno, 2017 : 153).

Modal manusia merupakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan system pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persendari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”. Menurut UNDP kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor pertanian di negara maju semakin berkembang pesat. Sedangkan petani di Indonesia belum mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengoptimalkan kegiatan pertanian. Akibatnya posisi tawar (bargaining power) petani menjadi lemah. Sehingga masalah kemiskinan masih terus menerus muncul sampai sekarang ini. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan selain melakukan revitalisasi bidang pertanian, pemerintah juga mencanangkan program lain seperti program pengurangan pajak, pemberian bantuan tunai, dan peningkatan human capital (Bambang Suprayitno,2017 : 149).

Tingkat Pengangguran

Pembangunan berhasil jika tujuan pembangunan bisa tercapai. Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah satu faktor pembangunan harus dimaksimalkan potensinya agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk berperan serta dalam pembangunan disegala bidang. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan Pekerjaan. Pada kurun waktu 2014 – 2018 menunjukkan efektivitas penurunan angka tingkat pengangguran Kabupaten Simalungun cukup baik. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun sudah berjalan dengan baik, tentunya harus tetap ditingkatkan dan memerlukan evaluasi menyeluruh untuk tetap menekan angka pengangguran di Kabupaten Simalungun.

Kesehatan

Kesehatan baik secara kolektif maupun tersendiri memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun didukung oleh peningkatan sarana prasarana yang ada, baik infrastruktur maupun alat kesehatan. Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah antara lain Pelayanan Kesehatan 24 Jam, pembangunan puskesmas rawat inap, rehabilitasi puskesmas, akreditasi puskesmas, pelayanan

rujukan jaminan persalinan, program JKN, pelayanan POSBINDU penyakit tidak menular, serta pembelian ALKES, serta rawat inap. Beberapa Indikator kesehatan yang dianalisis terkait dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Adalah relevan apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

Infrastruktur

Infrastruktur dasar, penanganan program penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia seperti layak, ketersediaan air bersih/air minum layak, desa dengan akses jalan R4 dan akses listrik rumah tangga. Sarana air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat vital, akses pada air bersih merupakan indikator yang sangat berpengaruh pada kondisi kemiskinan untuk infrastruktur dasar, beberapa indikator yang dianalisis terkait dengan perkembangan kondisi kemiskinan antara lain :

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
3. Proporsi Desa Dengan Akses Listrik (%)
4. Rumah Tangga Akses Listrik (%)

Adapun analisis yang perlu dilakukan terhadap indikator tersebut adalah perkembangan secara umum di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan walaupun berfluktuasi terlihat pada gambar persentase 2014 sampai 2018. Secara Umum sebagai besar rumah tangga di Kabupaten Simalungun sudah teraliri aliran listrik dan kedepan bagi rumah tangga yang belum teraliri listrik tetap menjadi perhatian yang serius dari OPD terkait dalam penanganannya melalui pemanfaatan program Pemerintah Pusat dan Provinsi yang saat masih berjalan untuk pengadaan jaringan listrik khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari ke empat indikator bidang infrastruktur dasar yang dianalisis, maka hanya 3 (tiga) indikator yang masih merupakan faktor kemiskinan yaitu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik. Dari ketiga indikator diatas

hanya Proporsi Rumah Tangga dengan air minum layak yang belum sejalan dengan tingkat penurunan kemiskinan karena cenderung menurun tetapi pada indikator lainnya sudah mendukung dengan perkembangan tingkat penurunan kemiskinan. Sehingga agar korelasinya dapat sejalan terhadap penurunan tingkat kemiskinan perlu peningkatan perbaikan terhadap layanan air minum layak di Kabupaten Simalungun.

Ketahanan Pangan

Pertanian masih tetap menjadi tumpuan perekonomian Simalungun. Tidak sedikit kalangan praktisi yang beranggapan bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Kabupaten Simalungun secara umum. Kendati demikian sektor pertanian juga dihadapkan pada banyak kendala. Salah satunya adalah mengenai penyesuaian dan pengangguran lahan yang semakin lama beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian yaitu diantara kawasan pemukiman, selain penurunan jumlah lahan khususnya pertanian sawah permasalahan lainnya adalah penurunan minat terhadap profesi dimaksud terutama pada generasi muda.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi bidang ketahanan pangan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Simalungun antara lain :

1. Harga Beras (Rp)
2. Harga 6(enam) Jenis Bahan Kebutuhan Pokok Utama (Rp)
3. Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton)
4. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun Tahun 2019. Perkembangan IPM Simalungun Tahun 2010-2019 Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada

tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing - masing komponen indeks.

Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun, 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun

Simalungun meningkat dari 68,80 pada tahun 2010 menjadi 72,98 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Simalungun rata-rata

tumbuh sebesar 0,66 persen per tahun. Pada periode 2018-2019, IPM Simalungun tumbuh 0,68 persen. Selama periode 2010 hingga 2019, IPM Simalungun menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Simalungun mengalami peningkatan. Saat ini, pembangunan manusia Simalungun telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2013. Sementara selama periode 2010 hingga 2012 pembangunan manusia Simalungun hanya berstatus “sedang”.

Dalam laporan yang sama, kemajuan pembangunan manusia menurut UNDP dapat diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi kebutuhan dasar manusia yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak (Indeks Pembangunan Manusia 2013:7).

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM > 80
2. Kelompok “tinggi”: 70 < IPM < 80
3. Kelompok “sedang”: 60 < IPM < 70
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Gambar 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun, 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun Menurut Komponen, 2010-2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun Menurut Komponen, 2010-2019											
Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,87	69,98	70,08	70,14	70,24	70,34	70,43	70,53	70,75	71,07
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,73	11,75	12,28	12,57	12,63	12,69	12,7	12,71	12,75	12,77
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,31	8,33	8,35	8,37	8,7	8,8	8,86	8,95	9,18	9,36
Pengeluaran per Kapita	Rp. 1000	10.062	10.724	10.918	11.464	11.987	11.728	10.855	11.055	11.911	11.402
IPM		68,8	69,08	69,75	70,23	70,89	71,24	71,48	71,83	72,49	72,58
Pertumbuhan IPM	%	-	0,34	1,11	0,69	0,37	0,49	0,34	0,49	0,92	0,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun

Angka Buta Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah. Karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Gambar 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun, 2010-2019



Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2019

Indikator Angka Buta Huruf Menunjukkan kondisi penduduk yang tidak dapat menikmati pemerataan pendidikan sehingga dianggap memiliki kemampuan kurang untuk mengakses sumber daya dalam angka pengembangan diri, lingkungan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Angka tersebut didapatkan melalui perhitungan angka melek huruf dikurangi dengan 100%.

Indikator Angka Buta Huruf menunjukkan bagian masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi melalui pengenalan (baca dan nulis) huruf sehingga kurang memiliki daya dalam mengembangkan diri dan lingkungan hidupnya. Adapun upaya penuntasan Buta Huruf penduduk di Kabupaten Simalungun menunjukkan hasil yang cukup baik dengan penurunan Angka Buta Huruf yang efektif sejalan dengan program pendidikan yang telah dilaksanakan. Tingkat melek huruf yang tinggi(atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya

Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi

bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson

$$C(I) = C_{(i)}$$

$$\text{jika } C_{(i)} < Z$$

$$= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2}$$

$$\text{jika } Z < C_{(i)}$$

$$= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3}$$

jika $2Z < C_{(i)} < 3Z$

Dan seterusnya

Dimana :

$C(i)$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
 Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari (Indeks Pembangunan Manusia,2013:11).

Tabel 2.1 Komoditi Kebutuhan sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1. Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2. Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3. Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4. Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5. Teri	Ons	19. Garam	Ons
6. Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7. Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Gram
8. Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 batang
9. Susu kental manis	397 Gram	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg		

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,-. Sementara itu sampai tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,-, sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia.

Penyusunan Indeks

Sebelum perhitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{indeks } X(i, j) = \frac{(X(i, j) - x(i - \text{min}))}{(X(i - \text{maks}) - X(i - \text{min}))} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

$X_{(i,j)}$ = Komponen IPM ke - I dari daerah J

$X_{(i-\text{min})}$ = Nilai minimum dari Komponen IPM ke - i

$X_{(i-\text{maks})}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke -i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Catatan
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	69,87	70,75	Sesuai Standar Global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,73	12,77	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,31	8,95	Sesuai Standar Global (UNDP)
Pengeluaran per Kapita	10092 (2010)	10855 (2016)	UNDP menggunakan PDB per Kapita ril yang disesuaikan

Sumber: Analisis Indeks Pembangunan Manusia 2013

Keterangan :

a) perkiraan maksimum pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II tahun 2018

b) penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3 komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia yaitu dimensi kemiskinan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.

Menghitung IPM, IPM dihitung sebagai rata-rata *geometric* dari indeks kemiskinan, indeks pendidikan, dan indeks pembangunan.

IPM

$$= \sqrt[3]{\text{kemiskinan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran} \times 10}$$

Menghitung indeks komponen, dimensi kemiskinan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.

$$i \text{ kemiskinan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

$$i \text{ pendidikan} = \frac{HLS + RLS}{2}$$

i pengeluaran

$$= \frac{in(\text{pendapatan}) - in(\text{pendapatan min})}{in(\text{pendapatan maks}) - in(\text{pendapatan min})}$$

Adapun komponen IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas. Persamaan diatas akan menghasilkan 0 Indeks Xi 1, untuk mempermudah membaca nilai indeks tersebut, maka persamaan itu dikalikan 100, sehingga nilai indeksnya adalah 0 indeks Xi 100 .

Hubungan antar Variabel

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat

miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Aimon, 2012).

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mahmudi (2007) dalam widodo dkk (2011), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan

seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia, di mana dalam lingkaran kemiskinan terdapat tiga indikator pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang tidak mampu untuk dicapai oleh masyarakat miskin. ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat.

METODE DAN DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis hubungan asosiatif kausalitas, yaitu penelitian yang mencari hubungan (pengaruh) sebab-akibat dari variabel independen atau variabel yang mempengaruhi (X) terhadap variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Y). Dalam penelitian ini berusaha menjelaskan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan (X_1), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kemiskinan (X_2), terhadap indeks pembangunan manusia (Y) sebagai variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Model analisis regresi linear berganda yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bidang pendidikan dan pengeruh bidang kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program statistik sehingga menghasilkan persamaan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.15
Data Regresi Linear Berganda

IPM	PENDIDIKAN HLS + RLS / 2	KEMISKINAN UHH
68.8	34.40	69.87
69.03	34.40	69.98
69.79	34.52	70.08
70.28	34.90	70.14
70.89	35.14	70.24
71.24	35.45	70.34
71.48	35.62	70.53
71.83	35.74	70.75
72.49	35.92	71.07
72.98	36.25	71.07

Tabel 4.16
 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-33.541	29.157		-1.150	.288		
HLS + RLS / 2	1.685	.389	.799	4.332	.003	.088	11.318
UHH	.640	.596	.198	1.074	.318	.088	11.318

a. Dependent Variable: IPM

Sumber :output SPSS 21 data diolah

Dimana:

Y = IPM (Persen)

X1 = PENDIDIKAN (Rupiah)

X2 = KEMISKINAN (Rupiah)

Berdasarkan tabel di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = -33.541 + 1.685X_1 + 640X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dari tabel diatas maka hasil regresi linear

berganda dapat disimpulkan sebagai berikut :

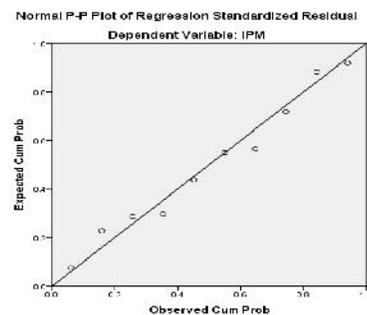
1. Konstanta = -33.541 artinya jika nilai HLS + RLS , UHH , IPM bernilai nol maka Y = -33.541.
2. Koefisien variabel X₁ atau HLS + RLS = 1.685 berarti setiap kenaikan pendidikan berpengaruh positif terhadap Y. Jika Pendidikan sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.685 %.
3. Koefisien variabel X₂ Kemiskinan sebesar 640 artinya jika Kemiskinan mengalami perubahan sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan kenaikan sebesar 640 %.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji model persamaan regresi dengan metode estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS). Jika memenuhi semua asumsi klasik maka akan memberikan hasil yang *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), yaitu bila memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Untuk itu dilakukan uji terhadap model apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik.

Uji normalitas dimaksud untuk menguji nilai residual yang telah di standarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut dengan mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas data ini menggunakan metode grafik P-P Plot .

Gambar 4.14.
 Hasil Grafik P-P Plot

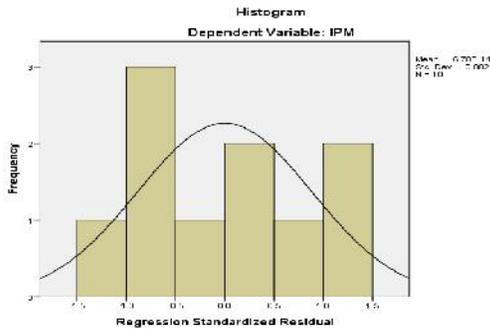


Sumber :output SPSS 21 data diolah

Dari gambar histogram, terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis diagonal membuat pola gelombang yang teratur. Dari gambar normal P-

Plot di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.

Gambar 4.15
Grafik Histogram



Sumber :output SPSS 21 data diolah

Berdasarkan grafik pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa grafik histogram membentuk sebuah lonceng. Hal ini menunjukkan jika dilihat dari grafik histogram data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data normal atau yang berdistribusi normal.

Uji normalitas data ini juga menggunakan metode Skewness – Kurtosis yaitu dimana Skewness secara sederhana diartikan tingkat kemencengan suatu distribusi data penelitian. Sedangkan Kurtosis merupakan tingkat keruncingan distribusi penelitian. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Skewness – Kurtosis:

Tabel 4.16
Tabel Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
IPM	70.8810	1.40203	10
HLS + RLS / 2	35.2340	.66465	10
UHH	70.4070	.43374	10

Sumber :output SPSS 21 data diolah

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, dan Kemiskinan terdapat data yang berdistribusi normal, hal ini disebabkan dari nilai statistik pada variabel tersebut masih berada direntang nilai -2 hingga +2. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Jika ada korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Cara menguji asumsi autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW), jika angka $D_L < DW < D_U$ dan $D_L < (4 - D_U) > D_U$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.17

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 ^a	.979	.973	.23047	1.174

a. Predictors: (Constant), UHH, HLS + RLS / 2

b. Dependent Variable: IPM

Sumber :output SPSS 21 data diolah

Dari tabel diatas diketahui ditemukan hasil berikut: Nilai DW adalah 1.815.

Nilai dL dengan n=10, (k=2, α=5%) = 0,5253

Nilai dU dengan n=10, (k=2, α=5%) = 2,0163

$4 - d_U = 4 - (2,0163) = 1,9837$

Nilai DW berada pada zona :

$d_L < DW < d_U$ dan $d_L < (4 - d_U) > D_U$ **0.5253 < 1.174 > 2.0163** dan **0.5253 < 1,9837 > 2.0163**

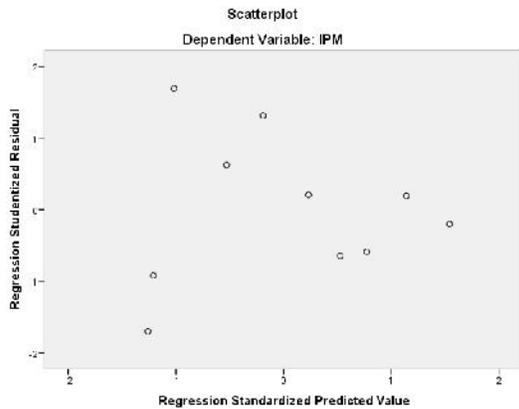
Dapat disimpulkan dengan metode Durbin Watson bahwa tidak terjadi autokorelasi model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Dasar analisis grafik Scatterplot adalah jika titik – titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Gambar 4.18.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :output SPSS 21 data diolah

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplots, diketahui dalam uji ini tidak adanya gejala heteroskedastisitas ditemukan. Hal ini dibuktikan dari gambar diatas titik – titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolonieritas di dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* (TOL) dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Aturan baku yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolonieritas adalah nilai *tolerance* (TOL) tidak lebih dari 10 atau sama dengan nilai VIF suatu variabel tidak kurang dari 10.

Tabel 4.19.
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-33.541	29.157		-1.150	.288		

HLS + RLS / 2	1.685	.389	.799	4.332	.003	.088	11.8
UHH	.640	.596	.198	1.074	.318	.088	11.8

a. Dependent Variable: IPM

Sumber :output SPSS 21 data diolah

Berdasarkan tabel output “*coefisients*” pada bagian “*Vollinearity Statistic*” diketahui nilai Tolerance untuk ketiga variabel adalah lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk ketiga variabel adalah lebih besar dari 7. Maka mengaju pada dasar pengambilan keputusan dalam uji Multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Dilihat dari tabel 4.3. Hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Variabel penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebagai variabel independen. Bahwa koefisien hasil Uji-t dari Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 (<5%). Untuk nilai t hitung yang dihasilkan adalah sebesar 4.332sedang nilai t tabelnya adalah 2,262. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara positif dan signifikan.

2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X2) terhadap Indeks Pembangunan (Y)

Variabel penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X2) sebagai variabel independen. Bahwa koefisien hasil Uji-t dari Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X₂) menunjukkan tingkat signifikansi 0.027 (>5%) yang berarti pengaruh kemiskinan

secara signifikan terhadap Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X_2). Untuk nilai t hitung yang dihasilkan adalah sebesar 1.074 sedang nilai t tabelnya adalah 4.46. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X_2) mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara positif dan signifikan.

Kondisi ini mengandung arti semakin tinggi nilai IPM mengakibatkan semakin rendah tingkat Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan pada Bappeda. Hal ini disebabkan IPM mengindikasikan tingkat pembangunan pada pendidikan yang akan mengakibatkan menurunnya tingkat kemiskinan. Untuk nilai t tabel lebih besar dari t hitung, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara parsial.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F atau *Analysis Of Variance* (ANOVA) digunakan untuk menguji masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,05$ dan menerima atau menolak hipotesis. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20.
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	17.319	2	8.660	163.026	.000 ^b
Residual	.372	7	.053		
Total	17.691	9			

- a. Dependent Variable: IPM
- b. Predictors: (Constant), UHH, HLS + RLS / 2

Sumber: output SPSS 21 data diolah

Untuk menguji apakah model dapat digunakan yaitu membandingkan Sig. pada tabel ANOVA dengan taraf nyatanya (alfa 0,05%). Jika Sig. > 0,05 maka model ditolak namun jika Sig. < 0,05 maka model diterima. Pada tabel uji F di atas nilai sig. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan model dapat diterima. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui pula bahwa secara

bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung 163.026 yang lebih besar dari nilai F tabel (4.20). Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia atau dapat dikatakan bahwa Pendidikan dan Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun. Sehingga hipotesis yang menyatakan Pendidikan dan Kemiskinan secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun dapat diterima.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

Tabel 4.21.
Hasil Uji R^2 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 ^a	.979	.973	.23047	1.174

- a. Predictors: (Constant), UHH, HLS + RLS / 2
- b. Dependent Variable: IPM

Sumber: output SPSS 21 data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan koefisien korelasi I dan koefisien determinasi (*R square*), Nilai R menerangkan tingkat hubungan antara variabel-variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y). Dari hasil olahan data diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,989 atau sama dengan 989% artinya hubungan antara variabel X (Pendidikan) terhadap variabel Y (IPM) dalam kategori kuat. *R square* menjelaskan seberapa besar variabel yang disebabkan oleh X dari hasil perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,979 atau 979. Artinya 97% Indeks Pembangunan dipengaruhi oleh kedua variabel besar Pendidikan

dan Kemiskinan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. *Adjusted R square* merupakan nilai R² yang disesuaikan sehingga gambarnya lebih mendekati mutu peninjakan model, dari hasil perhitungan nilai *adjusted R square* sebesar 0,973 atau 97,3 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pendidikan dan kemiskinan sangat besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada hipotesis yang terbukti dan ada juga yang tidak terbukti. Untuk itu, bagian pembahasan ini akan berisi pembahasan yang lebih terperinci mengenai masing – masing variabel.

PEMBAHASAN

Dari hasil regresi serta persamaan regresi yang telah dikemukakan maka dapat diinterpretasikan terhadap hipotesis yang telah diambil sebelumnya. Adapun interpretasinya adalah:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X₁) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan”. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa APBD untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, artinya peningkatan APBD meningkatkan IPM. Nilai koefisien APBD untuk pendidikan 1.685 yang artinya apabila APBD untuk pendidikan meningkat sebesar 1 rupiah akan menaikkan IPM Kabupaten Simalungun sebesar -33.541 persen. Adanya hubungan positif antara APBD untuk pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

menunjukkan bahwa semakin tinggi APBD untuk pendidikan, maka IPM juga akan meningkat.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kemiskinan (X₂) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kemiskinan, yang mendasari pada kondisi, maka Pemerintah menyempurnakan Perpres Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi Perpres nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta memperkuat Kelembagaan. pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kemiskinan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Dari hasil pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa APBD untuk kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Simalungun dengan nilai koefisien sebesar 640. Adanya hubungan positif antara APBD untuk pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa semakin tinggi APBD untuk kemiskinan, maka IPM juga akan meningkat.

Analisis pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap IPM

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga yang menunjukan bahwa Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Kabupaten Simalungun. Dengan nilai koefisien sebesar -33.541. artinya jika rasio ketergantungan meningkat 1 persen maka akan menurunkan IPM Kabupaten Simalungun sebesar - 33.541 persen .

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi H Agus. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015* . Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi.Universitas Islam Indonesia Yogyakarta . 2018.
- WINARTI ASTRI. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia diIndonesia Periode 1992-2012*. Program

- Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas di Ponegoro Semarang. 2014.
- Walewangko, Een N. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya terhadap Kemiskinan*. Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.2018
- Adi Widodo, dkk. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan* .Program Sarjana Ekonomi Pembangunan.Universitas Brawijaya. Jawa Timur. 2011
- Merang Kahang, dkk. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerrintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Volume, 118, (2), 2016. ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X.
- Nadia Ayu Bhakti, dkk. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. ISSN 1411 – 0393.
- Tirtarahardja,umar dan La sulo. 2017. *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta. Jakarta
- Suuprayitno, Bambang.2017. *Ekonomi Publik*, UPP STIM YKPN.Yogyakarta
- Sukirno,Sadono.2006. *Ekonomi Pembangunan*, Kencana .Jakarta
- Simalungun, Bappeda dan BPS Simalungun, 2019. *Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten. Bappeda Simalungun dan BPS Simalungun*.
- Halim ,Abdul .2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Novietha Indra Sallama .Jakarta
- Mulyadi S .2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, PT Raja Grafindo Persada .Jakarta
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- <https://simalungunkab.bps.go.id/pressrelease/2020/03/04/57/indeks-pembangunan-manusia--ipm--simalungun-tahun-2019-.html>
- <https://simalungunkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- <http://www.en.m.wikipedia.org/wiki/interpolation>
- Astri, Meylina. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Vol.1. No. 1 Tahun 2012. ISSN: 2302-2663.
- K, Johana Maria. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.Volume 1, No. 1.